



PELANTIKAN PERDANA MENTERI PALESTINA

Perdana Menteri Palestina Mohammad Mustafa (depan) mengambil sumpah di Kota Ramallah, Tepi Barat, Minggu (31/3). Pemerintahan baru Palestina yang dipimpin oleh Perdana Menteri Mohammad Mustafa dilantik di Tepi Barat pada Minggu (31/3).

Panas Pemilu Turki! Oposisi Menang-Erdogan Kalah

Hal ini diyakini menjadi pukulan telak bagi Erdogan di mana penantangannya mengalahkan jagoannya dalam pemilu.

ISTANBUL(IM)- Pemilihan umum (pemilu) dilakukan di Turki. Dilaporkan bagaimana oposisi Presiden Recep Tayyip Erdogan menang di beberapa kota penting, termasuk Istanbul, pusat ekonomi, dan Ankara.

Mengutip Reuters, Senin (1/4), pemilu lokal nasional menegaskan bagaimana partai berbasis sekuler Partai Rakyat Republik (CHP) unggul dari Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP). Ini diyakini menjadi pukulan telak bagi Erdogan di mana penantangannya mengalahkan jagoannya dalam pemilu.

Mengutip AFP, hasil parsial dari seluruh negara berpenduduk 85 juta orang itu menunjukkan kemajuan CHP

dibandingkan AKP, meski Erdogan telah meluncurkan kampanye habis-habisan, terutama di Istanbul, tempat ia pernah menjadi wali kota. Inflasi yang merajalela dan krisis ekonomi disebut memukul kepercayaan warga terhadap partai yang berkuasa.

Di Istanbul, wali kota asal partai CHP Ekrem Imamoglu menang mengalahkan kandidat Erdogan dengan lebih dari satu juta suara. Saat ini 96% kotak suara telah dibuka. "Kami memenangkan pemilu," ujar Imamoglu (54), dikutip Senin (1/4).

Di Ankara, Wali Kota asal CHP yang lain, Mansur Yavas juga mengklaim kemenangan. Di depan pendukungnya, ia bahkan telah

mengklaim kemenangan dan mengatakan pemilu sudah selesai. "Mereka yang diabaikan telah mengirimkan pesan yang jelas kepada mereka yang memerintah negara ini," katanya yang menang 58,6% dari kandidat partai Erdogan yang hanya menang 46,4%.

Hal sama juga terjadi di Izmir, kota ketiga di Turki dan Antalya. Basis AKP disebut berisiko hilang dari kedua kota itu. "Para pemilih telah memilih untuk mengubah wajah Turki," kata ketua CHP Ozgur Ozel ketika hasil pemilu diumumkan.

"Mereka ingin membuka pintu menuju iklim politik baru di negara kita," tambahnya.

Sementara itu, menurut salah satu warga Guler Kaya yang berbasis di Istanbul, partai Erdogan memang mendominasi kampanye. Namun kekhawatiran terus meluas karena perekonomian negara.

"Semua orang khawatir tentang kehidupan sehari-hari," kata pria 43 tahun itu.

"Krisis ini menelan kelas menengah, kita harus mengubah semua kebiasaan kita. Jika Erdogan menang, keadaan akan menjadi lebih buruk lagi," tambahnya.

Menurut analisis, hasil pemilu ini akan meramalkan bagaimana masa depan politik AKP ke depan. Pasalnya ini menjadi "kekalahan pemilu terbesar dalam karir Erdogan". "Meski persaingannya tidak seimbang, kandidat pemerintah kalah bahkan di kubu konservatif. Ini adalah hasil terbaik CHP sejak pemilu 1977," kata akademisi Universitas Sabanci, Berk Esen, di akun media sosialnya.

"Siapa pun yang memenangkan Istanbul, maka Turki juga akan menang," ujar Erman Bakirci, pengamat jajak pendapat dari Konda Research and Consultancy.

Erdogan sendiri te-

lah menjadi presiden sejak 2014. Ia pun baru memenangkan jabatan Presiden Turki di Mei 2023.

Pemilu dilakukan saat negeri itu terhuyung-huyung dari tingkat inflasi sebesar 67%. Mata uang lira juga merosot dari 19 per dolar AS menjadi 32 per dolar AS dalam satu tahun.

Sementara itu, bentrokan bersenjata dilaporkan terjadi di wilayah tenggara Turki yang mayoritas penduduknya Kurdi. Satu orang tewas dan 12 lainnya luka-luka.

Partai DEM yang pro-Kurdi mengatakan pihaknya telah mengidentifikasi kejangalan pemilu di hampir seluruh Provinsi Kurdi. Khususnya melalui kasus-kasus mencurigakan dalam pemungutan suara proksi. Sekitar 61 juta orang berhak memilih wali kota di 81 provinsi di Turki. Pemilu ini juga memilih anggota dewan provinsi dan pejabat lokal lainnya. **tom**

Presiden Korea Selatan Akhirnya Mau Berkompromi, Minta Dokter Akhiri Aksi Mogok

SEOUL(IM)- Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengatakan pada Senin (1/4), bahwa pemerintahannya terbuka untuk melakukan pembicaraan dengan dokter yang menentang rencananya untuk meningkatkan penerimaan sekolah kedokteran, sambil menuduh para pengkritik tidak menawarkan alternatif yang masuk akal untuk mengurangi kekurangan dokter.

Dalam pidatonya selama 50 menit di negara tersebut, untuk pertama kalinya Yoon mengisyaratkan kesediaannya untuk mengupayakan kompromi terhadap proposal reformasi medisnya setelah pemerintah menyerukan dialog dengan para dokter yang mogok.

Yoon Suk Yeol meminta maaf atas ketidaknyamanan yang disebabkan oleh pemogokan yang sedang berlangsung oleh para dokter magang, tetapi menuduh sektor medis menempatkan kepentingan mereka sendiri di atas kesehatan masyarakat. "Jika Anda menemukan solusi yang lebih tepat dan masuk akal, kita bisa mendiskusikannya sebanyak yang Anda mau," katanya.

"Jika Anda menyajikan pendapat yang lebih baik dan alasan yang rasional, kebijakan pemerintah dapat berubah menjadi lebih baik," tambahnya. Lebih dari 90% dari 13.000 dokter magang di negara tersebut telah melakukan aksi mogok kerja sejak 20 Februari sebagai protes terhadap rencana pemerintah untuk meningkatkan penerimaan sekolah kedokteran

sebesar 2.000 mulai 2025 dari 3.000 saat ini. Populasi Korea Selatan yang berjumlah 52 juta jiwa memiliki 2,6 dokter per 1.000 orang pada 2022, jauh di bawah rata-rata 3,7 di negara-negara Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). Pemerintahan-pemerintahan sebelumnya telah merancang langkah-langkah untuk mengatasi kekurangan dokter di layanan-layanan penting termasuk unit peritrik dan gawat darurat, serta klinik-klinik di luar wilayah Seoul, namun upaya mereka gagal di tengah penolakan kuat dari sektor medis.

Beberapa profesional medis mengatakan pemerintahan Yoon telah gagal melakukan konsultasi terlebih dahulu, dan rencana tersebut tidak akan banyak memperbaiki situasi saat ini, termasuk rendahnya gaji bagi dokter yang masih magang.

Yoon membantah beberapa klaim kelompok dokter dan menyoroti mengapa reformasi medis sangat penting. "Setelah bungkam atas permintaan pemerintah untuk memberikan jumlah tertentu untuk kuota sekolah kedokteran, komunitas medis kini memberikan jumlah seperti 350, 500, dan 1.000 tanpa alasan apa pun," katanya.

"Jika mereka ingin berargumentasi bahwa skala peningkatan harus dikurangi, mereka harus mengajukan gagasan terpadu dengan bukti ilmiah yang kuat, daripada mengambil tindakan kolektif," tambahnya. **ans**

Wartawan Diminta Berhenti Mencuri Suvenir dari Pesawat Resmi Kepresidenan AS Air Force One

WASHINGTON (IM) - Jurnalis telah diminta untuk berhenti mencuri suvenir dari pesawat resmi Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden, Air Force One.

Pemeriksaan inventaris di Air Force One setelah kunjungan Biden ke pantai barat AS pada Februari lalu menemukan beberapa item hilang dari bagian persnya.

Sarung bantal merek, kacamata, dan piring berbingkai emas termasuk di antara barang-barang yang diduga hilang dari jet tersebut. Asosiasi Koresponden Gedung Putih memperingatkan bahwa dilarang mengambil barang dari pesawat. Bulan lalu, asosiasi tersebut mengirim email kepada wartawan yang mengatakan bahwa perilaku seperti itu berdampak buruk pada kelompok pers, kelompok jurnalis yang bepergian bersama presiden dan harus dihentikan.

Jurnalis terkadang diberikan paket kecil coklat M&M yang dihias dengan stempel presiden sebagai suvenir.

Namun mengambil barang-barang berlogo Air Force One, termasuk peralatan makan dan handuk sudah menjadi hal yang lumrah selama bertahun-tahun.

Misha Komadovsky, Koresponden Gedung Putih dari Voice of America, telah mengumpulkan koleksi "halus" dari perjalanannya dengan pesawat presiden.

"Saya tidak memperlakukan siapa pun atau melakukan kesalahan apa pun untuk mengumpulkan koleksi ini," katanya kepada BBC

News, sambil mengangkat cangkir kertas berlogo Air Force One yang lupa dibuang.

Komadovsky juga memiliki sekotak M&M kepresidenan dengan tanda tangan Biden.

"Peringatan spoiler. Itu adalah M&M biasa dalam kotak yang bagus," katanya.

Air Force One, yang oleh Gedung Putih disebut sebagai "kantor di langit" presiden, memiliki luas lantai 4.000 kaki persegi (372 meter persegi) yang tersebar di tiga tingkat.

Fasilitas-fasilitasnya yang mengesankan mencakup ruang suite yang luas untuk presiden, sebuah stasiun medis dengan meja operasi, ruang konferensi dan ruang makan, dua dapur persiapan makanan yang dapat memberi makan 100 orang sekaligus, dan area khusus untuk pers, VIP, keamanan dan kesekretariatan. staf.

Dengan avionik dan pertahanannya yang canggih, pesawat ini digolongkan sebagai pesawat militer, dirancang untuk menahan serangan udara.

Pesawat ini juga mampu mengisi bahan bakar di udara, memungkinkannya terbang dalam waktu tak terbatas, penting dalam keadaan darurat.

Air Force One juga dilengkapi dengan peralatan komunikasi yang aman, sehingga pesawat dapat berfungsi sebagai pusat komando bergerak.

Ada 85 telepon on-board, kumpulan radio dua arah dan koneksi komputer.

Presiden duduk di depan, sedangkan jurnalis ditempatkan di bagian belakang pesawat. **tom**

Anak-anak Pejabat Iran Nikmati Kebebasan di Barat

KANADA(IM)- Ashagh Ghalibaf mencoba mendapat visa tinggal permanen di Kanada selama lima tahun. Dia adalah anak ketua parlemen Iran dan tinggal di Kanada sejak 2019. "Saya telah lama meneliti imigrasi warga Iran di Kanada yang memiliki koneksi dengan Garda Revolusi atau pejabat berpengaruh Republik Islam," kata jurnalis Kamran Malekpour kepada DW. "Orang-orang ini, yang punya banyak uang berkat hubungan keluarga atau bisnis korup, bermigrasi ke negara-negara Barat untuk menikmati kehidupan yang bebas. Ada komunitas besar Iran di Kanada."

Eshagh Ghalibaf adalah anak Bagher Ghalibaf, mantan komandan Garda Revolusi, yang saat ini menjabat sebagai ketua parlemen. Sebagai anak pejabat, dia dibesarkan di lingkungan elit di Teheran. Berkat sistem kuota yang berpihak pada pejabat dan pendukung setia Republik Islam, dia mendapat tempat kuliah di universitas.

Eshagh kemudian pergi ke Australia dan membayar \$300.000 untuk kursus bahasa dan belajar di Universitas Melbourne. Selama studinya dia membeli dua apartemen di sana. Ayah Eshagh Ghalibaf, Bagher Ghalibaf, adalah mantan komandan Garda Revolusi dan pernah menjabat sebagai kepala polisi negara tahun 2003. Selama masa jabatannya, dia berhasil menindas protes mahasiswa dengan kekerasan. Dari 2005 sampai 2017, Bagher Ghalibaf menjabat sebagai Wali Kota Teheran.

Menurut laporan jurnalis Iran, banyak properti milik negara selama masa jabatannya dijual dengan harga yang sangat murah kepada para pejabat pemerintahan. Keluarga Ghalibaf sendiri membeli

beberapa properti. Tuduhan korupsi terhadap Ghalibaf tidak diusut tuntas karena kedekatannya dengan pemimpin agama dan politik Republik Islam, Ayatollah Ali Khamenei. Sejak 2020 Bagher Ghalibaf menjabat sebagai Presiden Parlemen Iran. Jurnalis yang memberitakan dugaan korupsi malah divonis penjara karena tuduhan pencemaran nama baik.

Setelah Kamran Malekpour mempublikasikan kasus Ghalibaf, dua petisi diajukan kepada pemerintah Kanada. Petisi itu menuntut pemerintah Kanada mencegah penerbitan visa permanen untuk Eshagh Ghalibaf. Akhir Februari, menteri imigrasi Kanada memberi tahu pers bahwa permohonan izin tinggal permanen Eshagh Ghalibaf telah ditolak.

Bagi Malekpour, kasus Ghalibaf adalah sebuah preseden. Selama ini petisi semacam itu selalu ditolak pemerintah Kanada, dengan alasan bahwa anak-anak tidak bertanggung jawab atas perbuatan orang tuanya. Banyak anak pejabat Iran yang kemudian tinggal di Kanada dan mendapat visa permanen. Mereka juga dibolehkan membawa orang tuanya untuk menikmati hidup bebas di Kanada.

Seperti misalnya Morteza Talaie, mantan kepala polisi Teheran. Dia salah satu pejabat yang bertanggung jawab atas perampokan perempuan Iran yang dianggap tidak mengenakan jilbab dengan benar. Akhir tahun 2022, selama penindasan brutal terhadap gerakan protes di Iran, Talaie mengunjungi putrinya di Kanada. Di sana dia difilmkan sedang berada di gym di samping seorang wanita muda yang mengenakan pakaian olahraga. **tom**

Serangan Israel Tewaskan Komandan Penting Hizbullah di Lebanon

BEIRUT(IM) - Militer Israel kembali melancarkan serangan udara ke wilayah Lebanon. Serangan itu diklaim telah menewaskan seorang komandan penting Hizbullah, kelompok yang didukung Iran di Lebanon.

Seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Senin (1/4), militer Israel dalam pernyataannya mengklaim seorang komandan Hizbullah bernama Ismail Al-Zin tewas dalam serangan udara yang menargetkan sebuah kendaraan di wilayah Lebanon pada Minggu (31/3) waktu setempat.

Al-Zin diidentifikasi oleh Tel Aviv sebagai komandan

unit rudal anti-tank Pasukan Radwan Hizbullah.

"Al-Zin merupakan sumber pengetahuan penting mengenai rudal anti-tank dan bertanggung jawab atas puluhan serangan rudal anti-tank terhadap warga sipil, masyarakat dan pasukan keamanan Israel," sebut militer Israel dalam pernyataannya.

Seorang sumber yang dekat dengan Hizbullah menyebut Al-Zin bukanlah tokoh senior, namun membenarkan bahwa dia adalah anggota unit elite Radwan.

Israel sejauh ini telah menewaskan sekitar 25 anggota unit elite Radwan,

termasuk tiga komandan seperti Wissma Tawil yang merupakan seorang perwira senior Hizbullah yang memainkan peran utama dalam mengarahkan operasi kelompok itu di Lebanon bagian selatan.

Kelompok Hizbullah mulai melancarkan serangan roket ke wilayah Israel sejak Oktober tahun lalu, untuk mendukung sekutunya, Hamas, yang sedang berperang melawan militer Tel Aviv di Jalur Gaza. Serangan roket Hizbullah itu menuai balasan dari militer Israel, yang semakin meningkatkan ketegangan di perbatasan. **ans**



PROYEK PERAKITAN AIRBUS TIANJIN A320 KE-2

Para pekerja bekerja di lokasi pembangunan Proyek Perakitan Akhir Airbus Tianjin A320 ke-2 di Tianjin, Tiongkok, Minggu (31/3). Pembangunan pondasi gedung tunggal terbesar Proyek Jalur Perakitan Akhir Airbus Tianjin A320 ke-2 telah selesai pada Minggu. Proyek tersebut, yang bertujuan untuk memproduksi pesawat A320 dan A321neo, diharapkan mulai beroperasi pada akhir tahun 2026.